



Kebijakan Lesspaper dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

I Gusti Agung Alit Krisnu Saputra

Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Bali-Indonesia

Email Correspondence: agungalitkrisnu@gmail.com

How to Cite: Saputra, I, G, A, A, K. (2023). Kebijakan Lesspaper dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8 (1): 35-41. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.35-41>

Abstract

Lesspaper is a policy in the context of using paper efficiency, this is related to promotion services. Where promotion for state civil servants is a form of agency appreciation for employees for what they have done, or related to achievements achieved by an employee, besides that it can also be a form of giving appreciation to employees for having done their job and responsibilities very well. Through this policy, it is hoped that promotion services will be effective, fast, and not take a long time, which is an advancement in technology related to digitalization. The purpose of this study was to find out how the implementation of the non-paper policy in promotion services at the Bali Provincial Personnel and Resources Development Agency was also to find out what were the inhibiting factors in the implementation policy. The approach in this study uses a qualitative approach that can describe what has been studied. Through data collection by observation, interviews, and documentation. By presenting data in the form of data collection, data reduction, drawing conclusions, and assessing the validity of a data with triangulation techniques. The results of the study show that the implementation of the non-paper policy in promotion services in the Civil Service and Resource Development Section of the Province of Bali has not been carried out optimally, because there is still the implementation of the old policy, namely conventionally. The inhibiting factors consist of communication, human resources and facility resources, as well as dispositions.

Keywords: policy implementation; paperless; promotion

Abstrak

Lesspaper merupakan suatu kebijakan dalam rangka penggunaan efisiensi kertas, hal ini berkaitan dengan pelayanan kenaikan pangkat. Dimana kenaikan pangkat bagi aparatur sipil negara merupakan sebagai bentuk apresiasi instansi terhadap pegawai atas apa yang telah dilakukannya, atau berkaitan dengan prestasi yang diraih seorang pegawai, selain itu dapat juga menjadi bentuk dimana pemberian apresiasi bagi pegawai karena telah melakukan pekerjaan dan tanggungjawabnya dengan sangat baik. Melalui kebijakan ini diharapkan dalam pelayanan kenaikan pangkat berlaku secara efektif, cepat, dan tidak menghabiskan waktu yang lama dimana hal ini merupakan suatu kemajuan dari teknologi yang berkaitan dengan digitalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan lesspaper dalam pelayanan kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Bali selain itu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan lesspaper dalam pelayanan kenaikan pangkat ini. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan kualitatif yang dapat mendeskripsikan dari apa yang telah diteliti. Melalui pengumpulan data secara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dengan penyajian data secara pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan, serta menilai keabsahan suatu data dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lesspaper dalam pelayanan kenaikan pangkat di Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Bali belum terlaksana secara optimal hal ini dikarenakan masih terdapatnya pelaksanaan kebijakan yang lama yakni secara konvensional. Faktor-faktor penghambatnya yakni terdapatnya komunikasi, sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas, serta disposisi.

Kata Kunci: implementasi kebijakan; paperless; kenaikan pangkat

1. Pendahuluan

Hal yang sangat penting untuk dilakukan merupakan peningkatan kualitas pelayanan oleh pemerintah, dalam hal ini berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disebut dengan PNS. Terhadap pelayanan kepada masyarakat tersebut ASN memiliki posisi strategis dengan suatu pelayanan yang profesional, jujur, adil, dan merata. Sehingga hal ini menjadi fokus utama bagi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang tinggi. Sehingga perlunya pegawai yang berintelektual, disiplin, serta memiliki moral yang tinggi dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menciptakan suatu pelayanan publik yang baik maka peran ASN sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pelayanan yang meningkat disetiap harinya.

Kebijakan-kebijakan yang berlaku di masyarakat beragam jenisnya mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan sosial budaya serta lainnya. Tidak semua orang dapat menerima suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, bisa jadi terdapat masyarakat yang mendukung atau bahkan yang bertentangan dengan suatu kebijakan tersebut. Sehingga ASN menjadi kunci daripada keberhasilan dari suatu kebijakan yang dibuat pemerintah bersangkutan. Pemerintah dalam hal ini diharapkan mampu untuk membangun suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) hal ini dapat terwujud jika sumber daya manusianya dapat mendukung sehingga diperlukan ASN dengan intelektualitas dan kinerja yang tinggi. Selain itu demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik maka diperlukan suatu kualitas pelayanan public yang sangat baik pula. Salah satunya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali memiliki suatu visi misi yang berkaitan dengan pemberian pelayanan public secara responsif kepada pegawai dan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dimana salah satu upaya dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada pegawai yang dilakukan merupakan dengan pemberian suatu *reward* yakni berupa kenaikan pangkat.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 atas Perubahan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa “pangkat bagi pegawai negeri merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian”. Sehingga kenaikan suatu pangkat sangat berhubungan erat terhadap pendidikan, pelatihan kerja, serta suatu kenaikan penghasilan. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali pada periode 1 April 2022, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan pelayanan kenaikan pangkat dapat dilihat pada table 1.

Namun saat ini proses pelayanan kenaikan pangkat pada Badan dan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dilaksanakan secara online semenjak dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010. Penerapan secara *online* ini dilakukan untuk menghindari terjadinya suatu korupsi, kolusi, dan nepotisme serta untuk bentuk mempermudah urusan pemerintahan yang dilakukan secara *online*. Maka hal ini akan berkaitan dengan Surat Edaran dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 231/KR.X.K/VI/2019 tanggal 13 Mei 2019 terkait dengan “pelayanan kepegawaian berbasis *lesspaper* yaitu pelayanan yang meminimalisir penggunaan kertas dalam berkas usul pelayanan kepegawaian guna meningkatkan efisiensi dalam pelayanan.”

Tabel 1: Data Layanan Kenaikan Pangkat Pns Pemerintah Provinsi Bali Periode 1 April 2022

NO	JENIS KP	PANGKAT	JUMLAH
1	Kenaikan Pangkat Reguler/Otomatis Jabatan Pelaksana	I/d	2
		II/a	2
		II/b	8
		II/c	6
		II/d	78
		III/a	17
		III/b	137
		III/c	12
		III/d	44
		IV/a	5
JUMLAH			311
2	Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu	II/d	123
		III/a	7
		III/b	142
		III/c	97
		III/d	126
		IV/a	104
		IV/b	112
		IV/c	57
		IV/d	6
		JUMLAH	
3	Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural	III/d	5
		IV/a	18
		IV/b	5
		IV/c	1
JUMLAH			29
4	Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan/Transformasi	III/b	1
		III/c	4
		III/d	14
		IV/a	19
JUMLAH			38
NO	JENIS KP	PANGKAT	JUMLAH
5	Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	III/a	6
JUMLAH			6
JUMLAH TOTAL			1.158

Penggunaan sistem online serta *lesspaper* ini bertujuan untuk efisiensi dan mempercepat proses kenaikan pangkat seorang ASN. Sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Selain suatu kemudahan akses yang diberikan dalam penggunaan *lesspaper* ini masih terdapat suatu kendala lainnya terkait dengan input scan berkas yang tidak lengkap ataupun berkas berkas yang diinput tidak sesuai dengan persyaratan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti terkait pelayanan kenaikan pangkat berbasis *lesspaper* dan memfokuskan objek penelitian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.

2. Konsep Teori

Konsep Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu rangkaian yang berkaitan dengan konsep dan asas dimana hal tersebut menjadi suatu pedoman serta dasar rencana dalam melakukan suatu perencanaan dan pelaksanaan dalam bekerja. Menurut Suharto (2010:7) “Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.” Sehingga kebijakan merupakan suatu pemahaman terhadap pemerintah mengenai suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Kebijakan tersebut berfungsi untuk mengatur serangkaian kehidupan dari masyarakat secara luas dalam suatu daerah. Sehingga pemahaman kebijakan inilah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan

suatu kebijakan public atau biasa disebut (*public policy*).

Menurut Wibawa dkk, (2006: 15) menyatakan “kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.” Sehingga dalam pelaksanaannya suatu kebijakan publik hendaknya tidak boleh bertentangan terhadap suatu nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pada dasarnya kebijakan merupakan sarana pemecahan masalah dalam suatu masyarakat sehingga diharapkan tidak bertentangan dengan nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat sehingga tidak terjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut.

Lesspaper dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat

Lesspaper merupakan suatu upaya dalam rangka mengurangi penggunaan terhadap suatu kertas dimana dalam hal ini dimaknai sebagai pengurangan bukan berarti tidak menggunakan kertas sama sekali. Apabila dihubungkan dengan administrasi perkantoran rasanya sangat tidak mungkin untuk tidak menggunakan kertas sama sekali dalam dokumen administratif perkantoran. Hal ini merupakan bentuk kemajuan serta penerapan perkembangan teknologi yang ada dengan juga menghindari penggunaan *filling cabinet* sebagai tempat penyimpanan arsip dan merupakan pekerjaan yang memakan waktu terlalu lama.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Iwan Hermanto menjelaskan bahwa “*less-paper* yang diartikan dalam layanan Kenaikan Pangkat (KP), yakni dengan mengurangi persyaratan administratif yang sebelumnya masih memerlukan banyak dokumen, kini diminimalisasi.” Pelayanan kenaikan pangkat dengan *lesspaper* ini bertujuan untuk efisiensi dokumen yang harus digunakan dalam pengajuan suatu kenaikan pangkat sebagai syarat administratif. Dampak yang ditimbulkan merupakan efisiensi waktu serta proses penetapan dan pengusulan dapat berjalan dengan cepat dan singkat namun tetap pada prosedur yang kompleks.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan kualitatif yakni menggambarkan serta mendeskripsikan dari apa yang telah diamati yang dituangkan dalam kata-kata secara beruntut dan detail dimana penelitian ini berlokasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali dengan menganalisis implementasi kebijakan *lesspaper* berkaitan dengan kenaikan pangkat di instansi yang bersangkutan. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu bahan primer, bahan sekunder, serta bahan tersier. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yakni menggunakan informan yang menjadi pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui suatu observasi, wawancara, dan dokumentasi hal ini bertujuan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang akurat. Dimana hasil dari penelitian tersebut nantinya dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, selanjutnya dilakukan suatu penarikan kesimpulan serta mengecek keabsahan data dengan teknik triangulasi data.

4. Pembahasan

Implementasi Kebijakan Lesspaper dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

Tujuan dilakukannya suatu kenaikan pangkat adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya serta tanggungjawabnya selain itu hal ini dapat memotivasi pegawai dalam meningkatkan kualitas kerjanya. Pelayanan kenaikan pangkat dengan menggunakan kebijakan *lesspaper* merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*). George

Edward III (Winarno, 2008:174) mengemukakan bahwa “terdapat faktor yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan yakni berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.”

Faktor komunikasi sangat mempengaruhi suatu implementasi daripada kebijakan, hal ini berkaitan dengan ketika seseorang sudah mengetahui apa yang dikerjakan maka kebijakan tersebut akan berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan tujuan-tujuan suatu kebijakan dapat dipahami oleh masyarakat secara luas. Kebijakan *lesspaper* merupakan suatu kebijakan baru, dimana sebelumnya pelayanan kenaikan pangkat tersebut menggunakan suatu kertas secara berlebihan. Pelaksanaan kebijakan *lesspaper* terkait dengan pelayanan kenaikan pangkat dapat dikatakan belum optimal, karena dengan sistem kebijakan yang baru maka harus terdapat proses adaptasi perubahan cara kerja dari yang sebelumnya secara konvensional menjadi *online*. Hal ini juga dikarenakan belum terdapat suatu sosialisasi tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan *lesspaper* dalam pelayanan kenaikan pangkat dimana masalah yang sering terjadi merupakan berkaitan dengan salah inputnya suatu dokumen dalam pengusulan kenaikan pangkat tersebut. Selain itu yang menjadi pemegang utama kendali merupakan ASN yang masih belum aktif dalam memantau segala berkas yang diperlukan untuk pelayanan kenaikan pangkat tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali para ASN tidak hanya dalam satu golongan umur, namun terdapat berbagai golongan umur, tidak terhindari berkaitan dengan masih banyaknya ASN yang sudah lanjut usia sehingga hal ini menjadi kendala dalam penggunaan teknologi, tidak semudah bagaimana ASN usia muda dalam cepat memahami perkembangan teknologi.

Sumber daya menjadi hal yang penting dalam implementasi kebijakan *lesspaper* dalam hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia maupun fasilitas penunjang. Pengimplementasian kebijakan ini berkaitan dengan bagaimana sumber daya manusia dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga apabila terdapat beberapa sumber daya yang tidak memahami dalam penggunaan sistem ini hal itulah yang menyebabkan tidak berlaku efektifnya pelaksanaan kebijakan *lesspaper*. Selain itu fasilitas penunjang juga mempengaruhi terkait dengan sistem *online* yang sering mengalami *error system* tentunya hal ini berada diluar kendali manusia yang bersnagkutan. Dengan adanya kebijakan *lesspaper* ini maka proses pengusulan kenaikan pangkat menjadi lebih mudah karena dilakukannya digitalisasi dan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Belum maksimalnya pelaksanaan suatu kebijakan ini perlu dilakukan suatu evaluasi serta sosialisasi pelatihan dalam melakukan suatu kebijakan *lesspaper* dalam rangka kenaikan pangkat yang lebih berefisiensi.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan *Lesspaper* Pelayanan Kenaikan Pangkat

Komunikasi

Pada pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dialami oleh ASN dalam melakukan kebijakan *lesspaper* ini hal ini diakrenakan kurangnya komunikasi yang berkaitan dengan pelatihan maupun sosialisasi dari kebijakan *lesspaper* ini. Selain itu dengan kecanggihan dan kemajuan teknologi ini tidak dapat dilakukan hanya dengan sosialisasi sesekali saja namun pelru dilakukannya suatu pelatihan, mengingat ASN tidak hanya berasal dari satu golongan umur, tetapi terdapat juga golongan umur sudah lanjut usia sehingga membutuhkan suatu pelatihan lebih ekstra dalam pelaksanaan kebijakan *lesspaper* ini.

Sumber Daya

Penghambat berdasarkan sumber day aini terbagi menjadi dua yakni sumber daya manusia dengan sumber daya fasilitas. Berdasarkan sumber daya manusia, pegawai belum sepenuhnya mampu memahami prosedur serta mekanisme dari kebijakan *lesspaper* dalam proses pelayanan kenaikan pangkat dimana masih seringnya juga terjadi kesalahan dalam

penginputan atau *scan* berkas yang diperlukan. Selain itu berdasarkan sumber daya fasilitas masih seringnya terjadi *system error* yang disebabkan diluar kendali manusia sehingga memperlambat proses pengusulan kenaikan pangkat tersebut.

Disposisi

Berkaitkan dengan sikap serta komitmen dari para pegawai, hal ini berkaitan dengan pemahaman terhadap proses pelayanan publik serta kelengkapan berkas. Masih sering terjadi informasi yang kurang valid terkait dengan bagaimana sasaran kinerja pegawai (SKP) dengan kategori baik tersebut belum jelas nilainya, dimana hal tersebut menjadi syarat suatu kenaikan pangkat.

5. Simpulan

Kebijakan *lesspaper* merupakan suatu kebijakan yang sangat inovatif hal ini juga berdasarkan pada kemajuan digitalisasi, yang menyebabkan efisiensi kerta dan waktu dalam melaksanakan suatu pelayanan publik berkaitan dengan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat merupakan suatu hal sebagai bentuk apresiasi terhadap ASN atas pekerjaan yang telah dilakukan ataupun prestasi yang diraih dan atas keberhasilannya dalam melakukan suatu tanggungjawabnya. Dimana kebijakan *lesspaper* ini memudahkan para pegawai ASN yang ingin melakukan pelayanan kenaikan pangkat menjadi lebih cepat dan dapat dilakukan secara *online*, namun yang harus dipahami bahwa kebijakan ini hanya mengurangi penggunaan kertas bukan berarti tanpa menggunakan kertas sama sekali.

Implementasi kebijakan *lesspaper* di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali belum terlaksana secara maksimal hal ini disebabkan masih terdapatnya pelayanan kenaikan pangkat yang dilakukan secara konvensional atau dengan sistem lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni komunikasi berkaitan dengan belum terlaksananya sosialisasi dan pelatihan daripada kebijakan *lesspaper* ini sehingga masih banyak kebingungan yang dirasakan pegawai dalam melaksanakannya, selain itu terdapat dari sumber daya manusia yang belum memahami bagaimana prosedur serta mekanisme dalam pelaksanaannya ditambah lagi dengan sistem yang masih sering *error*. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan ini harus masih terdapat evaluasi serta sosialisasi mendalam terkait bagaimana prosedur serta mekanisme mengenai kebijakan *lesspaper* ini dalam pelayanan kenaikan pangkat.

Daftar Pustaka

- Arvia, O. (2018). Manajemen sumber daya aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka reformasi birokrasi di badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah (BKPPD) Kota Pekalongan (*Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science*).
- Gusta, B. W. (2017). Prosedur Kenaikan Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kota Semarang (*Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences*).
- Moonti, R. M., Ismail, N., Karepoan, J. K., & Djanggih, H. (2018). Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 151-161.
- Nurmayanti, N., Parida, M., & Yuansyah, M. R. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional (ASN) Metode Topsis. *Jurnal Informasi dan Komputer*, 10(1), 89-96.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Rovinus Laka Knaofmone, Agustinus Longa Tiza, Marthen Patiung (2021). "Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis Berbasis Less-Paper di BKD Kab.

TTU”Vol 1 No 2 (2021): JAD (Jurnal Admnistrasidan Demokrasi) Mei 2021

- Savitri, Dessy (2020). “Implementasi Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Berbasis Online pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Kota Medan” Universitas Sumatera Utara
- Sefira Wardany (2018). “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Simanjuntak, C. A. M. (2022). *Kebijakan Kenaikan Pangkat/Golongan Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-30/V.79-5/99 perihal Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah diundangkannya Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Wandira, N. T., & Santoso, T. (2022). *Pelayanan Kenaikan Pangkat Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo*. In *Seminar Nasional Hasil Skripsi* (Vol. 1, No. 01, pp. 96-100).